



Sebelas Maret University
Indonesia



International Indonesia Forum for Asian Studies

Certificate of Participation

This is to certify that

Meita Istianda

has contributed

as

PRESENTER

in the 2nd International Indonesia Forum for Asian Studies Conference
Exploring Inter-Regional and International Cooperation in Indonesia

Venue

Sebelas Maret University, Solo, Indonesia
27-28 April 2016

Organized by

Sebelas Maret University and International Indonesia Forum for Asian Studies



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.

Dean of the Teacher Training and Education Faculty



Johny Richard Weintré, PhD.

Chairperson of International Indonesia Forum for Asian Studies

IIA.1d.1a.6

IIA.1d.1a.6

**Exploring Inter-Regional and International Cooperation in Indonesia
The 2016 International Indonesian Forum for Asian Studies (IIFAS) Conference
in partnership with Sebelas Maret University**

Conference Programme

Day 1 (Wednesday, 27th April 2016)

Morning Session	
07.15-08.00	Registration
08.00-08.10	Opening Ceremony
08.10-08.30	Opening Remarks <ul style="list-style-type: none"> • Johan Richard Weintré, PhD Chairperson of the International Indonesia Forum for Asian Studies • Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd. Dean of the Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, Indonesia
08.30-09.00	Conference photo shoot followed with the serving of refreshments and snacks
Plenary Session	
09.00-10.50	Keynote Speakers <ul style="list-style-type: none"> • Sulaiman Dufford Adjunct Assistant Professor of Anthropology at the International Islamic University, Malaysia • Kulbir Singh Dhillon Dean of the College Development Council and Student Welfare, Punjabi University, Patiala, India • Andrik Purwasito Professor of International Relations Department, Sebelas Maret University, Indonesia • Balraj Singh Department of History, Punjabi University, Patiala, India
Parallel Session I	
11.00-12.30	Room I: Gender and Politics Room II: Local and Global Discourses Room III: Health and Food Security Room IV: Regional and Global Tribulations Room V: Local Culture and Experiences
12.30-13.30	Lunch and refreshments
Parallel Session II	
13.30-15.00	Room I: Cultural Identity Room II: Language and Strategies Room III: The Dynamics of Faith Room IV: Tradition and Arts Room V: Local History and Education
15.00-15.30	Refreshment break
Parallel Session III	
15.30-17.00	Room I: Education and Development Room II: History and International Economic Cooperation Room III: Regional Communities Room IV: Ecology and Industry Room V: Education and Development
End Session Day 1	

Day 2 (Thursday, 28th April 2016)

Morning Session	
07.30-08.00	Registration
Parallel Session IV	
08.00-09.30	Room I: Inter-Regional Issues Room II: The Economic Development Process Room III: Human Development for Global Inspiration Room IV: Tourism and Performing Arts Room V: Education and Process
09.30-10.00	Refreshment break
Parallel Session V	
10.00-11.30	Room I: Social Communication Room II: Boundary Issues Room III: Culture & Education Room IV: Locality and International Linking Room V: Sharing and Tradition
11.30-11.45	Closing Ceremony Opportunities for photo sessions and exchange of personal calling cards
11.45-12.30	Lunch
	Display in the lunch room with commentary on the 1 st day of the conference from 11.00-12.00 noon. Poster Presentation

Interaksi Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia di Era Demokrasi

Dr. Meita Istianda
FISIP Universitas Terbuka, meita@ut.ac.id

Abstrak

Dalam sistem politik yang demokratis, kekuatan negara tidak hanya ditopang oleh satu kekuatan politik, tetapi ditopang oleh berbagai macam kekuatan politik. Kekuatan ini terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok atas dasar regional, etnis, dan agama, yang berinteraksi menghasilkan sebuah keseimbangan kekuatan. Setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru, kekuatan-kekuatan politik di Indonesia mengalami perpindahan, dari sistem politik yang otoriter, ke posisi sistem politik yang demokratis. Perpindahan tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan dari segi kuantitas dan fungsi kelembagaan. Perubahan yang terjadi di era demokrasi, merupakan “kunci” untuk memahami kelemahan dan ketegangan dalam sistem dominasi. Sistem politik yang demokratis telah membawa harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya secara lebih adil, tetapi di sisi lain, ia dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam kekacauan, akibat “kebebasan” yang berlebihan.

Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, makalah ini membahas interaksi kekuatan-kekuatan politik, yaitu partai politik, birokrasi, dan civil society. Ketiga kekuatan ini merupakan elemen yang dianggap mampu untuk mengarahkan jalannya demokratisasi di sebuah Negara. Partai politik dan birokrasi adalah elemen yang berinteraksi dalam konteks memproses kebijakan publik, dan civil society adalah elemen yang mengawal proses tersebut.

Kata kunci: demokrasi, kekuatan-kekuatan politik

Abstract

In a democratic political system, power of the state is not only supported by one political force, but is supported by a wide range of political forces. These forces consist of political parties, interest groups, groups on the basis of regional, ethnic and religious, which interact to produce a balance of power. After the collapse of the New Order regime, the political forces in Indonesia suffered displacement, of the authoritarian political system, to the position of a democratic political system. Such movements, resulted in a change in terms of quantity and institutional functions. The changes that occurred in the era of democracy, is a "key" to understanding the weaknesses and tensions within the system of domination. A democratic political system has brought hope to the people to get their rights in a more fair, but on the other hand, he could plunge society into chaos, as a result of "freedom" excessive.

In the context of democratization in Indonesia, this paper discusses the interaction of political forces, namely political parties, bureaucracy and civil society. These three forces are the elements that are considered able to direct the course of democratization in a country. Political parties and the bureaucracy are elements that interact in the context of the public policy process, and civil society are elements that oversee the process.

Keywords: democracy, political forces

Pendahuluan

Dalam sistem politik yang demokratis, kekuatan negara tidak hanya ditopang oleh satu kekuatan politik, tetapi ditopang oleh berbagai macam kekuatan politik. Kekuatan ini merujuk pada pendapat Edward Luttwak¹ terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok atas dasar regional, etnis, dan agama. Kekuatan ini berinteraksi menghasilkan sebuah perimbangan kekuatan.

Setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru, kekuatan-kekuatan politik di Indonesia mengalami perubahan. Di masa Orde Baru, kekuatan-kekuatan politik dikendalikan oleh sistem politik yang otoriter. Di masa pasca Orde Baru kekuatan tersebut mendapat kebebasan untuk mengekspresikan kepentingannya di bawah sistem yang demokratis. Partai politik bertambah jumlahnya, begitu juga kekuatan organisasi masyarakat lainnya seperti LSM, kelompok asosiasi dan sebagainya. Di lain hal, terjadi reformasi di tubuh lembaga negara, seperti pada birokrasi dan militer posisinya dinetralkan, tidak ikut campur dalam fungsi sosial politik.

¹ Edward Luttwak, *Coup d'Etat, a practical handbook: a brilliant guide to taking over a nation*, Greenwich, Fawcett Premier book, 1969, hal. 47.

Perubahan dari segi kuantitas dan fungsi kelembagaan dalam masa demokratisasi menjadi salah satu aspek yang menarik diperhatikan. Meminjam pendapat Guillermo O'Donnell, "demokrasi ibarat suatu kunci untuk memahami kelemahan dan ketegangan dalam sistem dominasi. Ia juga merupakan suatu petunjuk tentang apa yang masih implisit di belakang pengetahuan dangkal masyarakat, ia adalah fokus setiap harapan untuk mencapai legitimasi. Kendati demikian, ia juga merupakan suatu kotak pandora yang tidak boleh dianggap enteng."² Pernyataan O'Donnell menyiratkan bahwa sistem politik yang demokratis telah membawa harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya secara lebih adil, tetapi di sisi lain, ia dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam kekacauan akibat "kebebasan" yang berlebihan.

Dalam kaitannya dengan demokratisasi di Indonesia, makalah ini hendak membahas interaksi kekuatan-kekuatan politik yaitu partai politik, birokrasi, dan *civil society*. Ketiga kekuatan ini merupakan elemen yang dianggap mampu mengarahkan jalannya demokratisasi di sebuah Negara. Partai politik dan birokrasi adalah elemen yang berinteraksi dalam konteks *prosessing* kebijakan publik, dan *civil society* elemen yang mengawal proses tersebut. **Bagaimana interaksi di antara mereka? Apakah interaksi ketiga kekuatan tersebut dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam mendapat keadilan?**

Partai Politik

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Schattschneider menyatakan,

² Guillermo O'Donnell, "Tensions in the bureaucratic-authoritarian state and the question of democracy," dalam Louis Irving Horowitz, *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal. 389.

"*political parties created democracy*".³ Terkait dengan prinsip demokrasi, partai politik memiliki sejumlah fungsi yang harus dijalankan, yaitu sebagai mediasi antara pemerintah dan rakyat, pencalonan kandidat, mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik, dan pengatur konflik⁴ Melalui partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Namun pada kenyataannya, partai politik belum mampu menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan itu dengan sikap yang professional. Bahkan yang terjadi citra partai politik dinodai dengan perilaku buruk politisinya, yang disebabkan *pertama*, di dalam tubuh partai politik mengalir deras semangat pragmatism politik dan oportunisme. Sehingga solidaritas di antara mereka semata-mata karena ikatan kepentingan dan bukannya kepentingan masyarakat. *Kedua*, masih adanya kesadaran yang keliru bahwa partai adalah kesatuan orang dengan segala kepentingannya dan kepentingan elit yang dominan dimutlakkan. *Ketiga*, partai politik kurang mempunyai ketegasan dalam hal ideology sehingga platform nya tidak jelas. Dan *keempat*, partai politik cenderung mempunyai sasaran jangka pendek dalam bentuk perebutan kekuasaan lima tahunan.⁵ Kondisi yang terjadi di partai politik seperti itu, tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Birokrasi

Merujuk pada pendapat Guy Peters, dikatakan birokrasi memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat modern. Birokrasi sebagai alat atau mekanisme dari keputusan politik, mempunyai posisi strategis. Di satu sisi menjadi penerjemah dan

³ Lihat Elmer Eric Schattschneider, *Party government: american government in action*, New York, Farrar and Rinhart, 1942.

⁴ Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

⁵ Budi Winarno, *Sistem politik Indonesia era reformasi*, Yogyakarta, MedPress, 2007, hal. 101

sekaligus implementor kebijakan publik, di sisi lain sebagai pelayan publik ia harus responsif terhadap kebutuhan maupun aspirasi masyarakat.⁶

Birokrasi di Indonesia hingga saat ini belum efektif. Karena posisinya yang strategis, birokrasi justru dijadikan sebagai 'mesin uang' oleh partai politik dan sarana untuk mengakomodasi kepentingan partai politik. Hal ini menjadikan birokrasi mendapat stempel buruk di mata publik, yaitu cenderung korup. Contohnya kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Transmigrasi (DPIDT) pada Kementrans atau kasus Wisma Atlet yang melibatkan Kemenpora. Pada tingkat kelembagaan, birokrasi dibongkar pasang untuk mengakomodasi masuknya politisi. Akibatnya birokrasi tidak dapat bekerja secara optimal dan profesional karena selalu bergantung dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.⁷

Civil Society

Civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan-jaringan politik resmi. Larry Diamond menyatakan *civil society* melingkupi kehidupan sosial berorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. *Civil society* ini bersedia aktif secara kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki fungsi struktur negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara.⁸

⁶ Lihat B. Guy Peters, *The politics of bureaucracy*, London, Routledge, 2001.

⁷ Lihat David Osborn dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan birokrasi*, Jakarta, PT Teruna Grafika Press, 1995.

⁸ Lihat Larry Diamond, *Developing democracy toward consolidation*, Yogyakarta, IRE Press, 2003.

Pada era reformasi, *civil society* mendapat ruang yang leluasa bagi eksistensinya. Mereka terlibat aktif dalam lobi-lobi politik di DPR dan pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan publik. Tumbuh kembangnya *civil society* setelah Orde Baru runtuh, menimbulkan sebuah harapan baru yakni munculnya sebuah kekuatan penggerak pembaharuan yang selain kritis terhadap negara juga mempunyai kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, acap kali suara mereka terhalang oleh kepentingan kekuasaan yang lebih dominan. Oleh karena itu, sebagian di antara mereka ada yang bermanuver 'masuk' atau berafiliasi dengan partai-partai politik. Padahal dengan cara seperti itu, berpotensi mengurangi nilai otonomi mereka yang seharusnya mandiri.

Interaksi Kekuatan antara Partai Politik, Birokrasi, dan *Civil Society*

Pasca Orde Baru, interaksi kekuatan di antara partai politik, birokrasi, dan *civil society* terlihat dalam bentuk yang lebih konstruktif dikarenakan adanya keterbukaan politik serta kebebasan untuk berekspresi. Mereka tampil berbasis kepentingan masing-masing. Walaupun interaksi mereka telah mendapatkan 'wadahnya' dalam sistem yang demokratis, tidak serta merta interaksi tersebut terjalin harmonis, malah sarat dengan tawar menawar kepentingan. Sebagai contoh, pada proses penetapan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang rencananya diberlakukan mengiringi kenaikan BBM tahun 2012. Beberapa partai besar di DPR RI meminta agar penyaluran BLSM tersebut melalui Kementerian Sosial, dan sebagian partai lain meminta agar penyaluran BLSM harus melalui kepala daerah masing-masing.

Penetapan tersebut tidak lekang dari tarik menarik kepentingan politik, terkait dengan kompromi antara pemerintah dan legislatif dalam hal besaran biaya yang akan diberikan kepada masyarakat dan tahapan penyaluran BLSM tersebut. Misalnya kompromi antara pemerintah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghasilkan pernyataan bahwa PKS berkeinginan penyaluran BLSM ini melalui Kemensos. Hal ini tidak mengherankan, Kemensos itu diisi oleh PKS, di sisi lain partai tertentu menginginkan agar penyaluran ini melalui kepala daerah. Dan kita tahu bahwa sebagian besar kepala daerah dikuasai oleh partai tertentu. Sementara, di pihak civil society berkeinginan mengawasi, agar proses penyaluran dana BLSM itu tepat sasaran, tidak terjadi penyelewengan sebagaimana terjadi pada BLT.

Kesimpulan

Interaksi antara partai politik, birokrasi, dan *civil society* memiliki kesamaan dalam hal berkontribusi bagi kepentingan publik. Dalam konteks kebijakan, partai politik dan pemerintah memiliki fungsi mengagregasikan kepentingan dan menegosiasikan agar menjadi kebijakan negara. Sementara, *civil society* berperan menuntut agar kebijakan tersebut tidak melenceng dari tujuan sebenarnya. Namun sayangnya di era demokrasi, interaksi ketiganya justru terkendala oleh sistem demokrasi itu sendiri, sulitnya mencapai mencapai konsensus karena lebih dominannya tarik menarik kepentingan.

Agar interaksi kekuatan di antara ketiganya efektif bagi kepentingan publik, maka sudah seharusnya mereka memikirkan hakikat keberadaan mereka dalam sistem politik itu, yaitu untuk kepentingan siapa mereka ada. Bukankah rakyat sudah memberikan sebagian hak yang mereka miliki kepada kekuasaan, agar kekuasaan yang diberikan tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat. Sebaik apa pun sistem

itu apabila digunakan bukan untuk kepentingan rakyat, hanya akan mengantarkan rakyat kepada kemiskinan dan keterpurukan di atas kepentingan elit yang berkuasa. Dengan demikian, interaksi pada ketiga kekuatan tersebut, dalam sistem demokrasi yang berlebihan hanya menanti 'kotak pandora' terbuka yang akan mengantarkan rakyat pada kekacauan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Diamond, Larry, *Developing democracy toward consolidation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.

Luttwak, Edward, *Coup d'Etat, a practical Handbook: a brilliant guide to taking over a nation*, Fawcett Premier book, Greenwich, 1969.

Peters, B. Guy, *The politics of bureaucracy*, Routledge, London, 2001.

O'Donnell, Guillermo, "Tensions in the bureaucratic-authoritarian state and the question of democracy," dalam Louis Irving Horowitz, *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Osborn, David dan Gaebler, Ted, *Mewirusahaakan birokrasi*, PT Teruna Grafica Press, Jakarta, 1995.

Schattschneider, Elmer Eric *Party government: american government in action*, Farrar and Rinhart, New York, 1942.

Winarno, Budi, *Sistem politik Indonesia era reformasi*, MedPress, Yogyakarta, 2007